



Research Article

Eksplorasi Tafsir Ayat-Ayat Meritokrasi dalam Al-Qur'an: Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

M Irsyad Muhyiddin Abdul Haq¹, Muhammad Irsad², Muhammad Nur Amin³

1. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: isyad3236@gmail.com 
2. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: m.irsad@umala.ac.id
3. Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
E-mail: arwaniamin3@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 02, 2026

Revised : May 04, 2026

Accepted : June 03, 2026

Available online : July 06, 2026

How to Cite: M Irsyad Muhyiddin Abdul Haq, Muhammad Irsad and Muhammad Nur Amin. (2026) "Exploring the Interpretation of the Verses of Meritocracy in the Qur'an: Abdullah Saeed's Contextual Approach", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 285–299. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3413.

Exploring the Interpretation of the Verses of Meritocracy in the Qur'an: Abdullah Saeed's Contextual Approach

Abstract. Meritocracy is a system of placing individuals in positions or roles based on ability, achievement, and worthiness, not because of kinship, social status, or certain interests. This study aims to explore the interpretation of meritocratic verses in the Qur'an through Abdullah Saeed's contextual interpretation approach and analyze their relevance to the contemporary meritocratic leadership

system. This study uses a qualitative method with a library research type. Primary data are in the form of Qur'anic verses related to meritocracy, while secondary data are obtained from Abdullah Saeed's works, tafsir books, books, journals, and relevant academic studies. Data analysis is carried out descriptively-analytically through Abdullah Saeed's four steps of contextual interpretation. The results of the study indicate that meritocracy in the Qur'an does not only emphasize ability and achievement, but also integrity, character, empathy, and moral responsibility. QS Al-Qasas [28]: 26 emphasizes competence and trustworthiness, QS Al-Isra' [17]:84 emphasizes the suitability of roles to individual character, and QS At-Taubah [9]:128 presents a model of empathetic and compassionate leadership. Thus, meritocracy from the perspective of the Qur'an offers a leadership paradigm that is holistic, ethical, and relevant to contemporary organizational and governmental governance.

Keywords: Meritocracy, Al-Qur'an, Contextual Interpretation, Abdullah Saeed

Abstrak. Meritokrasi merupakan sistem penempatan individu dalam jabatan atau peran berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kelayakan, bukan karena hubungan kekerabatan, status sosial, atau kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tafsir ayat-ayat meritokrasi dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed serta menganalisis relevansinya terhadap sistem kepemimpinan meritokratis kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan meritokrasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari karya-karya Abdullah Saeed, kitab tafsir, buku, jurnal, dan kajian akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui empat langkah tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meritokrasi dalam Al-Qur'an tidak hanya menekankan kemampuan dan prestasi, tetapi juga integritas, karakter, empati, dan tanggung jawab moral. QS Al-Qasas [28]:26 menekankan kompetensi dan amanah, QS Al-Isra' [17]:84 menegaskan kesesuaian peran dengan karakter individu, dan QS At-Taubah [9]: 128 menghadirkan model kepemimpinan yang empatik dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, meritokrasi dalam perspektif Al-Qur'an menawarkan paradigma kepemimpinan yang holistik, etis, dan relevan bagi tata kelola organisasi maupun pemerintahan kontemporer.

Kata Kunci: Meritokrasi; Al-Qur'an; Tafsir Kontekstual; Abdullah Saeed

PENDAHULUAN

Meritokrasi merupakan sistem atau prinsip penempatan individu dalam jabatan, peran, atau kedudukan sosial berdasarkan kemampuan (kompetensi), prestasi, dan kelayakan, bukan atas dasar hubungan kekerabatan, status sosial, atau favoritisme. Dalam kajian etika dan sosial, meritokrasi dipahami sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan, profesionalisme, dan efektivitas organisasi, karena setiap posisi diisi oleh individu yang paling memenuhi kriteria objektif.¹

Diskursus mengenai krisis meritokrasi di Indonesia semakin menguat, baik dalam ruang publik maupun forum akademik. Meritokrasi sebagai sistem yang menempatkan individu berdasarkan kemampuan, usaha, dan prestasi selama ini dipandang sebagai prinsip ideal dalam birokrasi, pendidikan, dan kepemimpinan modern. Secara normatif, meritokrasi dianggap mampu menciptakan keadilan,

¹ Siti Khodijah, "Meritokrasi dalam Al-Qur'an (Analisis Etika Rekrutmen Pejabat Publik melalui Perspektif Double Movement Fazlur Rahman)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025).

efisiensi, dan mobilitas sosial yang setara karena menolak dominasi faktor keturunan, kekayaan, dan koneksi. Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial yang ada.²

Berbagai kritik menunjukkan bahwa meritokrasi modern kerap menjelma menjadi mitos meritokrasi, di mana keberhasilan individu lebih banyak ditentukan oleh privilege struktural daripada kompetensi murni. Latar belakang ekonomi dan pendidikan yang kuat memberikan akses awal yang tidak setara, sehingga prestasi menjadi hasil akumulasi keuntungan sosial. Praktik nepotisme, relasi orang dalam, serta bias dalam rekrutmen dan promosi jabatan masih marak terjadi, baik di sektor publik maupun swasta. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan publik serta memperlebar jarak antara prinsip keadilan sosial dan praktik birokrasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan urgensi penguatan prinsip meritokrasi, termasuk dalam prosedur pemilihan pejabat pemerintahan, yang sejatinya telah memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Secara implisit, Al-Qur'an menegaskan pentingnya penempatan tugas dan kepemimpinan berdasarkan kemampuan dan amanah, sebagaimana tercermin dalam QS Yusuf [12]: 55. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa Yusuf a.s. mengajukan diri bukan semata-mata untuk meraih jabatan, melainkan karena kesesuaian antara kompetensi dan amanah yang dimilikinya dengan tugas perbendaharaan negara. Hal ini mencerminkan prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan profesionalisme dan tanggung jawab moral.³

Kajian tentang meritokrasi dalam Al-Qur'an telah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Muhammad Imam Asy-Syakir, Ira Nazhifatul Qolbah, Solehudin. Muhammad, Ira, dan Solehudin membahas mengenai konsep Meritokrasi dalam Al-Qur'an terkandung secara implisit dalam ayat-ayat tentang jabatan kepemimpinan atau pekerjaan, seperti ayat tentang Adam a.s. dan keturunannya yang dijadikan khalifah, Yusuf a.s. menjadi bendaharawan Mesir, Thalut dipilih menjadi raja.⁴ Kemudian Mu'ammarr Zayn Qadafy, dalam penelitiannya Mu'ammarr merumuskan tiga poin penting pembahasan mengenai Meritokrasi, ketiganya adalah kapabilitas dan moralitas (tafsir QS Al-Nur [24]: 55), profesionalisme (*right attitude*) (tafsir Al-Isra' [17]: 84), kepedulian dan tanggung jawab (tafsir Al-Taubah [9]: 128).⁵ Selanjutnya M. Zia Al-Ayyubi dalam artikelnya mengulas mengenai *metodologi penafsiran kontekstual* yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan mengaplikasikannya pada ayat jilbab (QS Al-Ahzab [33]: 59). Penafsiran tersebut menggunakan pendekatan

² Agil Sabani dkk., "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* Vol.1, no. 3 (2024): 144-52, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta, Lentera Hati, 2002). 434

⁴ Imam Asy-Syakir dkk., "Meritokrasi dalam Bingkai Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur'an) (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur'an)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 2, no. 1 (2024): 78-91, <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i1.528>.

⁵ Mu'ammarr Zayn Qadafy, "Meritokrasi Perspektif Al-Qur'an," *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 13, no. 2 (2015): 133-44, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v13i2.288>.

hermeneutik kontemporer yang melihat teks tidak hanya secara linguistik, tetapi juga melalui konteks sosio-historis turunnya wahyu serta realitas masyarakat sekarang.⁶

Dengan telah dicantumkannya kajian relevan di atas mengenai tema meritokrasi serta pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Peneliti menemukan celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Belum ada studi sebelumnya yang secara khusus mengaplikasikan kerangka empat langkah Saeed untuk mengeksplorasi konsep meritokrasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun literatur terkait telah membahas meritokrasi dalam Al-Quran maupun pendekatan kontekstual Abdullah Saeed secara terpisah, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal melalui integrasi penuh kerangka empat langkah Saeed untuk mengeksplorasi tafsir ayat-ayat meritokrasi secara spesifik, yang belum ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya, sehingga mengisi celah penelitian dengan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap isu birokrasi kontemporer di Indonesia.

Pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed menjadi landasan utama penelitian ini karena menyeimbangkan analisis kebahasaan teks dengan konteks sosio-historis dan kebutuhan zaman. Saeed mengembangkan gagasan ini sebagai kelanjutan dari pemikiran Fazlur Rahman, dengan menekankan bahwa pemahaman Al-Qur'an harus bersifat dinamis dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, prinsip meritokrasi dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara kontekstual dengan menekankan aspek kapabilitas, profesionalisme, moralitas, dan kerja keras, sehingga relevan untuk menjawab problem birokrasi modern seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat tema Eksplorasi Tafsir Ayat-Ayat Meritokrasi dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Dengan rumusan masalah, bagaimana tafsir ayat-ayat meritokrasi persepektif pendekatan kontekstual Abdullah Saeed? dan Bagaimana relevansi makna meritokrasi terhadap sistem kepemimpinan meritokratis kontemporer?. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep meritokrasi dalam Al-Qur'an serta relevansinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern, tanpa mengabaikan konteks pewahyuan dan prinsip dasar ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁸ Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna, bukan pada pengujian hipotesis atau pengukuran variabel secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan pesan normatif

⁶ M. Zia Al-Ayyubi, "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed :," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 19, no. 1 (2023): 53–80, <https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1708>.

⁷ Syarif Budiman dkk., Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an Abad Journal of Education Research, 5(1), 2024, hal 821.

⁸ Rendi Irawan Rendi dkk., "Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Munir Perspektif Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 2, no. 1 (2025): 54–68, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v2i1.1083>.

yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip Meritokrasi.⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber data utama, yaitu dengan memilih ayat-ayat yang ada keterkaitan dengan tema penelitian ini. Dengan menggunakan Karya-karya milik Abdullah Saed sebagai landasan utama dalam menganalisis ayat-ayat yang dipilih. Serta artikel-artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai data sekunder untuk menunjang dalam menyelesaikan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi tersebut meliputi teks Al-Qur'an, buku-buku milik Abdullah Saeed yang membahas mengenai pendekatan tafsir kontekstual, dan kitab kitab tafsir sebagai pendukung dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan meritokrasi.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema Meritokrasi dalam Al-Qur'an, tafsir kontekstual, serta hermeneutika Al-Qur'an. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang komprehensif serta memperkuat analisis penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan penelusuran tafsir dan kajian akademik sebagai bagian dari teknik pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji dan membandingkan berbagai pandangan mufasir serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelusuran ini dilakukan untuk memahami ragam penafsiran terhadap ayat-ayat Meritokrasi dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki pijakan akademik yang kuat dan kontekstual. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis *deskriptif-analitis*, yaitu dengan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung prinsip Meritokrasi, kemudian menganalisisnya secara sistematis berdasarkan tahapan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meritokrasi

Meritokrasi adalah sistem politik atau tata kelola yang memberikan kesempatan dan penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja, bukan berdasarkan kekayaan, hubungan kedekatan politik, kelas sosial, atau faktor non-objektif lainnya. Sistem ini menekankan bahwa posisi atau jabatan tertentu harus ditempati oleh individu yang memiliki kompetensi dan prestasi terbaik. Tujuan utama Meritokrasi adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan profesionalisme

⁹ A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan* (Jakarta, Kencana, 2014). Hal 329

¹⁰ Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19, no.2(2015):129-32, <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

serta mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan atau organisasi.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan faktor lainnya. Sistem ini menekankan bahwa jabatan atau tanggung jawab harus diberikan kepada orang yang memang berkompeten dan berprestasi, bukan karena hubungan keluarga, koneksi, atau pengaruh lainnya. Dengan demikian, Meritokrasi dianggap sebagai sistem yang lebih adil dan rasional karena mengutamakan kualitas dan kinerja sebagai dasar pengangkatan pejabat atau pemimpin.¹²

Meritokrasi berasal dari kata "merit", yang bermakna "kualitas baik yang layak mendapat penghargaan". Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Young pada tahun 1958 dalam karyanya berjudul "*Rise of the Meritocracy*".¹³ Secara praktis, sistem merit merujuk pada proses promosi dan perekrutan pejabat pemerintah yang didasarkan pada kemampuan individu dalam menjalankan tugas, bukan atas dasar hubungan politik. Dengan demikian, esensi dari sistem merit adalah profesionalisme. Stephen J. McNamee menjabarkan empat persyaratan utama dalam meritokrasi, yaitu bakat, sikap yang tepat, kerja keras, serta karakter moral yang tinggi.¹⁴

Meritokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi, terutama dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia. Sistem ini memastikan bahwa setiap individu yang menduduki jabatan dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi, bukan berdasarkan faktor non-objektif seperti hubungan kekeluargaan atau politik. Dengan demikian, Meritokrasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan, sehingga menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan *good governance* yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, serta dapat menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.¹⁵

Implementasi Meritokrasi juga berkontribusi dalam mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering menjadi hambatan utama dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan menata sistem rekrutmen dan promosi pegawai berbasis merit, Meritokrasi membuka peluang yang adil bagi individu yang berkualitas untuk berkontribusi optimal di berbagai sektor. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi mereka, sehingga prestasi kerja dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, penerapan Meritokrasi masih menghadapi tantangan seperti intervensi politik dan resistensi

¹¹"Meritokrasi," Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 20 September 2025, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Meritokrasi&oldid=27863584>.

¹²"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 28 September 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Meritokrasi>.

¹³ Michael Young, *The Rise Of The Meritocracy 1870-2033* (Thames dan Hudson, 1958).

¹⁴ Stephen J. McNamee, *The Meritocracy Myth* (Rowman & Littlefield Publishers, 2014). 16

¹⁵ Kamal Sulaiman dkk., "Sistem Meritokrasi dalam Upaya Penerapan Good Governance di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025): 131-40, <https://doi.org/10.9963/1a1c1111>.

budaya organisasi, yang memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran pelaku birokrasi.¹⁶

Abdullah Saeed dan Pendekatan Tafsir Kontekstual

Abdullah Saeed merupakan seorang akademisi dan sarjana studi Islam terkemuka yang lahir di Maladewa pada 25 September 1964.¹⁷ Abdullah Saeed adalah pemegang gelar *Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies* di University of Melbourne, Australia. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur *National Centre of Excellence for Islamic Studies* (sebelumnya disebut *Centre for the Study of Contemporary Islam*) di universitas yang sama. Fokus keahliannya meliputi pemikiran Islam, sejarah dan interpretasi Al-Qur'an, serta isu-isu Muslim kontemporer dalam menghadapi perubahan global. Beliau telah menghasilkan berbagai karya tulis ilmiah yang signifikan, di antaranya buku *Islamic Thought: An Introduction* (2006), *Interpreting the Qur'an* (2006), *The Qur'an: An Introduction* (2008), serta karya-karya lain mengenai perbankan syariah dan kebebasan beragama dalam Islam.¹⁸

Menurut Saed Al-Qur'an merupakan teks berbahasa Arab yang diturunkan pada abad ke-7 M, sehingga memiliki jarak linguistik, budaya, dan historis dengan masyarakat modern. Oleh karena itu, analisis linguistik menjadi langkah awal yang penting untuk mendekati dan memahami makna Al-Qur'an. Tradisi tafsir klasik telah mengembangkan beragam konsep dan metode kebahasaan meliputi aspek morfologi, sintaksis, stilistika, dan semantik yang masih relevan untuk digunakan. Namun, penafsiran Al-Qur'an secara kontekstual menuntut perhatian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada analisis bahasa, tetapi juga pada faktor-faktor sosial dan historis yang melingkupi teks.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikemukakan sebuah kerangka penafsiran melalui proses empat langkah sebagai dasar tafsir kontekstual. Diantaranya ialah: Pertama, Perjumpaan dengan dunia teks. Hal ini mencakup subjektivitas sang mufasir, serta hal-hal yang mempengaruhi karakter dan pola pikir dari sang mufasir. Kedua, Analisis Kritis. Langkah kedua dari pendekatan kontekstual Abdullah Saeed adalah upaya untuk mengidentifikasi makna asli yang berfokus kepada linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks-teks yang berkaitan, dan preseden pada ayat tersebut. Ketiga, Makna Bagi Penerima Pertama. Langkah ketiga dalam pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed adalah mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan, untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama. Keempat, menghubungkan teks dengan konteks masa kini.¹⁹

¹⁶ R Yudhy Pradityo, "Peran Meritokrasi Melalui Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Kelitbangan* vol 13 no 1(2025), <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/>.

¹⁷"Abdullah Saeed (professor)," Wikipedia, 5 Desember 2025, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdullah_Saeed_\(professor\)&oldid=1325815857](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdullah_Saeed_(professor)&oldid=1325815857).

¹⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London, Routledge, 2006).

¹⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. (London, Routledge, 2006). 296-299

Ayat-Ayat Tentang Meritokrasi dalam Al-Qur'an

Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang secara *eksplisit* menerangkan mengenai Meritokrasi. Namun, di sini penulis hanya akan memfokuskan pada tiga ayat Al-Qur'an. Dari ketiga itu diantaranya:

1. Qs Al Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Ayat ini tidak dapat ditafsirkan secara terpisah karena merupakan bagian dari narasi panjang tentang perjalanan hidup Musa. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 14 surah yang sama, Allah Swt. telah menegaskan bahwa Musa telah mencapai kematangan fisik dan kecerdasan mental yang sempurna. "Setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, Kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan". Ayat ini menjelaskan saat Musa tiba di sumur negeri Madyan dan menyaksikan peristiwa yang tidak selaras dengan fitrah lurus dan muru'ahnya. Para penggembala laki-laki mendahulukan ternak mereka untuk minum, sehingga menghalangi dua wanita yang hendak memberi minum ternak miliknya. Akibatnya, Musa menolong kedua wanita tersebut, yang kemudian salah satu dari wanita tersebut merekomendasikan Musa kepada ayahnya untuk dipekerjakan karena keutamaan akhlak dan kemampuannya.²⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai penjelasan ayat ini adalah, ketika salah seorang dari kedua putri Syu'aib (yang menggembalakan kambing ayahnya) berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja untuk kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu angkat sebagai karyawan adalah yang kuat secara fisik sekaligus amanah", sebagaimana riwayat bahwa putri tersebut yang berjalan di belakang Musa, mengusulkan hal itu setelah menyaksikan kekuatan Musa mengangkat batu besar yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh pria, serta perhatiannya yang melindungi dengan berjalan di belakang dan menanda jalannya dengan batu kerikil agar putri itu tak tersesat jika ia menyimpang dari jalur. Ulama seperti Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Syuraih al-Qadhi, Abu Malik, Qatadah, dan Muhammad bin Ka'ab sepakat bahwa kisah ini menunjukkan superioritas Musa dalam hal kekuatan dan kejujuran, di mana putri Syu'aib meyakinkan ayahnya dengan argumen konkret dari pengamatan langsung, sehingga ayahnya bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" dan putri itu menjawab dengan bukti mata: Musa mengangkat beban berat itu serta memastikan keselamatannya dengan berjalan di depan sambil memberi tanda jalan.²¹

Memahami istilah *Al-Qawiyyul Amin*. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir melihatnya secara harfiah: kekuatan fisik Musa terlihat saat ia mengangkat tutup sumur sendirian, sementara sifat amanahnya tampak dari sikap sopan terhadap putri Syu'aib. Dalam kisah itu, putri Syu'aib merekomendasikan Musa sebagai penggembala ternak ayahnya setelah Musa membantu mereka mengambil air di kota Madyan saat ia sedang lari dari Firaun usai membunuh orang Mesir. Rekomendasi ini

²⁰ Sayid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta, Gema Insani, 2004). 37-41

²¹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994). 266-268

jelas berdasar pengamatan nyata, bukan sekadar perkiraan.²² Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memperluas makna *Al-Qawiyy* menjadi kemampuan menyeluruh, mencakup aspek fisik, akal budi, dan jiwa esuai kebutuhan zaman kini yang penuh tuntutan keahlian khusus. Sementara *Al-Amin* diartikan sebagai sikap bertanggung jawab yang menjunjung amanah, mengelola tugas orang lain seperti milik sendiri tapi dengan ridha hanya kepada Allah.²³ Ditambah adanya alif lam ta'rif pada kedua kata tersebut yang menandakan sifat haqiqi, sehingga kriteria ini hanya pantas untuk figur seperti Musa yang sudah matang sejak digambarkan di ayat-ayat sebelumnya.

Secara tekstual, QS Al-Qashash: 26 dipahami sebagai bagian kisah Musa di Madyan, ketika salah satu putri Syu'aib merekomendasikan beliau sebagai pekerja karena melihat kekuatan fisik dan keamanahannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diterangkan secara naratif: Musa menolong dua putri Syu'aib di sumur, lalu salah satu berkata, "Pekerjakanlah dia, karena sebaik-baiknya orang yang kaupekerjakan ialah yang kuat lagi amanah". yang dipahami sebagai pujian atas kekuatan fisik dan kejujuran moral Musa. Dalam kerangka klasik, "*Al-Qawiy Al-Amin*" cenderung dimaknai secara harfiah sebagai kekuatan jasmani dan kejujuran, serta ayat ini lebih difokuskan pada teladan pribadi, bukan pada sistem kelembagaan.

Dalam tafsir kontekstual ala Abdullah Saeed, makna ayat diangkat menjadi nilai universal: "*Al-Qawiy*" dibaca sebagai kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme, sedangkan "*Al-Amin*" sebagai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap amanah. Dengan demikian, QS Al-Qashash: 26 dalam tafsir kontekstual bisa menjadi dasar etika rekrutmen, bahwa posisi kerja atau jabatan seharusnya diberikan kepada orang yang paling layak secara kompetensi dan integritas, bukan karena kekerabatan, uang, atau posisi sosial, sehingga tampak jelas perbedaan antara tafsir klasik yang naratif dan tafsir kontekstual yang normatif-sosial.

2. Qs Al Isra' Ayat 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُؤُكُمْ أَغْلَمُ مِمَّنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Ayat ini merupakan ancaman keras bagi kaum musyrik bahwasannya Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang dikerjakannya, sesuai dengan ayat sebelumnya yaitu pada ayat 83 Allah menjelaskan sifat umum manusia, yaitu apabila diberi kenikmatan, seperti harta, kekuasaan, kemenangan dan sebagainya, mereka tidak mau lagi tunduk dan patuh kepada-Nya, bahkan mereka menjauhkan diri. Sebaliknya, apabila ditimpa kesukaran, kesengsara-an, kemiskinan, dan kekalahan, mereka berputus asa dan merasa tidak akan memperoleh apa-apa lagi. Seharusnya mereka tidak berputus asa, melainkan tetap beramal dan berusaha untuk mendapatkan pertolongan Allah, karena menurut ajaran Al-Qur'an, orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti telah mengingkari rahmat-Nya.²⁴

Pada Tafsir KEMENAG RI dalam buku *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada

²² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994).

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Lentera Hati, 2002). 334

²⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994). 207-208

umatnya agar mereka bekerja menurut potensi dan kecenderungan masing-masing.²⁵ Semuanya dipersilakan bekerja menurut tabiat, watak, kehendak, dan kecenderungan masing-masing. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* lafaz *Asy-Syakilah* memiliki arti karakter, kebiasaan dan agama.²⁶ Allah Swt. sebagai Penguasa semesta alam mengetahui siapa di antara manusia yang mengikuti kebenaran dan siapa di antara mereka yang mengikuti kebatilan. Semuanya nanti akan diberi keputusan yang adil.²⁷

Lafaz شَاكِلَاتٍ merupakan bentuk kalimat isim, asal lafaz nya adalah شَكْل yang meliki arti sesuatu.²⁸ Imam Ath-Thabari dalam kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* menjelaskan makna lafaz syaklati (شَاكِلَاتِيَه) pada QS Al-Isra [17]: 84 sebagai "keadaan" atau "cara" seseorang dalam beramal, berdasarkan riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in. Ia meriwayatkan pendapat Ibnu Abbas bahwa syakilah merujuk pada keinginan manusia itu sendiri, Mujahid mengartikannya sebagai tabiat dan keinginannya, Qatadah menyebutnya menurut niat dan kemauannya, serta Ibnu Zaid mengaitkannya dengan keyakinan atau agamanya. Setelah menimbang riwayat-riwayat tersebut, Ath-Thabari menarjih makna syakilah sebagai pembawaan atau disposisi yang melekat pada diri seseorang, yang memengaruhi pola amal mereka, sehingga setiap individu bertindak sesuai karakter masing-masing.²⁹

Dalam tafsir klasik, QS Al-Isra': 84 dipahami sebagai penegasan bahwa setiap orang beramal sesuai dengan "Syakilah"-nya, yaitu tabiat, niat, keyakinan, dan cara masing-masing, seperti yang dijelaskan oleh ulama seperti al-Thabari, Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Dalam kerangka ini, ayat menegaskan keadilan Allah bahwa setiap manusia akan diberi balasan sesuai dengan motif dan cara amalnya, sehingga ayat ini lebih berorientasi pada akidah dan akhirat, bukan pada kehidupan sosial-ekonomi atau dinamika profesi modern.

Dalam tafsir kontekstual Saeed, makna "Syakilah" dioperasikan lebih luas sebagai profil potensi, karakter, dan minat setiap individu di dunia kerja dan masyarakat. Dalam konteks kekinian, ayat ini bisa dibaca sebagai dasar perlunya sistem yang menghargai keberagaman potensi: setiap orang perlu diberi peluang sesuai bakat dan kecenderungannya, bukan dipaksa mengikuti satu pola karier semata. Dengan demikian, QS Al-Isra': 84 tidak hanya menjadi penegasan keadilan ilahiyah, tetapi juga dasar etis yang mendukung prinsip meritokrasi, yaitu pengakuan dan pemanfaatan potensi individu secara proporsional, sehingga perbedaan antara tafsir tekstual yang konservatif dan tafsir kontekstual yang adaptif tampak jelas.

3. Qs At-Taubah Ayat 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Penjelasan ayat ini menurut Bisri Mustofa dalam tafsir *Al-Ibriz* Allah mengabarkan kepadamu wahai orang-orang beriman, bahwa telah datang Rasulullah

²⁵ KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Widya Cahaya, 2011).

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 8 (Jakarta, GEMA INSANI,). 149

²⁷ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Widya Cahaya, 2011). Hal 532-533

²⁸ "الباحث القرآني," diakses 2 April 2026, <https://tafsir.app/>.

²⁹ Muhammad Ibnu Jarir, *Terjemah Tafsir at-Thabari (al-Tabari) Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (PUSTAKA AZZAM, t.t.). 882-884

dari kaummu sendiri bukan dari bangsa jin atau malaikat. Berat terasa olehnya penderitaanmu, dan sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, serta tidak ada yang menyibukkannya kecuali urusanmu. Beliau adalah yang nantinya akan memberikan syafaat atas izin Allah kepadamu, dan beliau hanya rela kamu masuk surga.³⁰

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat pertama pada surah ini. Yaitu, sebagai penyeimbang beban taklif (kewajiban syariat) yang berat dalam surah tersebut, yang dimulai dengan pemutusan ikatan dari musyrikin dan kritik bertahap terhadap kemunafikan. Allah Swt. memudahkan pengemban taklif itu dengan menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. berasal dari kalangan Arab Quraisy sendiri satu jenis, keturunan, dan bahasa sehingga kemenangan serta kemuliaan beliau menjadi milik umat.³¹ Sebagaimana ditegaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang merujuk doa Nabi Ibrahim a.s. *"Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana"*. (QS Al-Baqarah [1]: 129) dan nikmat pengutusan rasul dari kaum sendiri *"Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika (Dia) mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab Suci (Al-Qur'an) dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata."* (QS Ali Imran [3]: 164).³²

Abu Ja'far ath-Thabari menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman kepada bangsa Arab dalam QS At-Taubah [9]: 128, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri," yang menegaskan pengutusan utusan ilahi dari kalangan mereka yang sudah dikenal nasab dan sifatnya, bukan dari bangsa asing, sehingga tidak ada alasan untuk menuduhnya dusta saat menyampaikan nasihat, sebagaimana pertanyaan retorik beliau kepada kaum yang masih ingkar. lafaz *"azizun 'alaihi ma 'anittum"* dimaknai sebagai penderitaan umat yang juga terasa berat di hati Rasulullah saw., menunjukkan empati mendalamnya terhadap kesusahan mereka, sementara *"harisun 'alaikum"* menggambarkan hasrat kuat beliau untuk menyelamatkan yang tersesat di kalangan umat dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Selanjutnya, *"bil-mu'minina ra'ufun rahim"* menegaskan kasih sayang luar biasa Rasulullah saw. yang lembut dan penyayang khusus bagi kaum mukmin.

Secara tafsir klasik, QS At-Taubah: 128 dipahami sebagai penegasan keutamaan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul yang berasal dari kalangan umatnya sendiri, sehingga tidak ada alasan menolaknya hanya karena perbedaan nasab atau bahasa. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Thabari menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan umatnya, serta sifat-sifatnya yang penuh empati,

³⁰ Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz* (Menara Kudus, 1964).

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 8. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 8 (Jakarta, Gema Insani,) 102-103

³² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994) 236-237

kepedulian, dan kasih sayang terhadap orang-orang mukmin, sehingga ayat ini lebih dihubungkan dengan aspek akhlak dan tauladan, bukan dengan model kepemimpinan modern.

Dalam pendekatan tafsir kontekstual, sifat “Azizun ‘Alaihi Ma ‘Anittum” (berat baginya penderitaan kalian) dan “Harisun ‘Alaikum” (berkeinginan kuat untuk kebaikan kalian) diangkat menjadi kriteria etika kepemimpinan masa kini. Dalam kerangka Saeed, pemimpin yang baik tidak hanya kompeten, tetapi juga peka terhadap kesulitan rakyat, memiliki kepedulian tinggi, dan menjalankan tugas dengan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, QS At-Taubah: 128 dalam tafsir kontekstual menjadi dasar kepemimpinan meritokratis yang menggabungkan keahlian, kepedulian, dan keadilan, sehingga tampak jelas bagaimana bacaan klasik yang fokus pada pribadi Rasul beralih ke bacaan kontekstual yang menekankan relevansi normatif bagi pemimpin zaman sekarang.

Relevansi Makna Ayat dengan Meritokrasi Kontemporer

QS Al-Qashash: 26 menyajikan ciri sistem meritokrasi paling eksplisit dalam Al-Qur'an melalui rekomendasi putri Syu'aib kepada ayahnya untuk mempekerjakan Musa sebagai penggembala kambing berdasarkan sifat “الْقَوِيُّ الْأَمِينُ” (kuat dan amanah). Dalam kerangka ayat ini, kompetensi tidak dinilai dari kekerabatan, kekayaan, atau latar sosial, melainkan dari pengamatan empiris terhadap kekuatan fisik Musa ketika mengangkat batu penutup sumur sendirian dan integritas moralnya ketika melindungi dua perempuan dengan berjalan di depan dan memberi tanda jalan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip penilaian objektif terhadap individu, di mana posisi yang diemban ditentukan oleh capacity (kemampuan teknis) dan character (akhlak dan kejujuran), sehingga membentuk sistem di mana penempatan tidak lagi bersifat subjektif atau nepotis, tetapi berbasis bukti nyata atas kualitas pribadi seseorang.

Sementara itu, QS Al-Isra': 84, “كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِرَتِهِ” (setiap orang beramal menurut karakternya), memberikan dasar sistemik lain bagi meritokrasi dalam Islam. Dalam tafsir klasik, Ath-Thabari dan ulama lain memahami syakilah sebagai disposisi bawaan: tabiat, niat, dan keyakinan seseorang yang membentuk pola amalnya. Dalam kerangka ini, Allah Swt. mengetahui siapa yang paling lurus jalannya, sehingga penilaian terhadap manusia tidak bisa dipaksakan seragam, melainkan harus menghormati perbedaan karakter, potensi, dan kecenderungan fitrah. Dengan demikian, sistem meritokrasi dalam Islam tidak mengandung unsur one-size-fits-all, tetapi mensyaratkan pola penempatan dan penghargaan yang berangkat dari profil kecenderungan (syakilah) setiap individu, sehingga setiap orang dihargai menurut cara amalnya sendiri, bukan menurut tolok ukur yang sama bagi semua.

Model ketiga muncul dalam QS At-Taubah: 128, yang menggambarkan Nabi Muhammad saw. sebagai “Rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri”, memiliki sifat “azizun ‘alaihi ma ‘anittum”, “harisun ‘alaikum”, “bil-mu'minina ra'ufun rahim” (berat baginya penderitaan kalian, berkeinginan kuat untuk kebaikan kalian, dan lembut penyayang kepada orang-orang mukmin). Dalam logika sistem meritokrasi, ayat ini menegaskan bahwa pemimpin ideal bukan hanya diukur dari kemampuan teknis atau jabatan formal, tetapi dari kualitas moral dan empati terhadap yang

dipimpin. Dengan demikian, sistem kepemimpinan dalam Islam menempatkan empati, kepedulian, dan kasih sayang sebagai bagian dari kriteria kelayakan, sehingga meritokrasi Islam tidak hanya mengandung unsur kompetensi dan keadilan distributif, tetapi juga keadilan relasional yang memperhatikan posisi lemah dan kebutuhan psiko-spiritual masyarakat.

Jika ketiga ayat ini dipadukan, Al-Qur'an menawarkan kerangka sistem meritokrasi yang utuh. QS Al-Qashash: 26 menekankan prinsip penilaian objektif individu berdasarkan kekuatan dan keamanan, sehingga menolak sistem yang berbasis kekerabatan dan keistimewaan sosial. QS Al-Isra': 84 memberikan logika keberagaman syakilah, yang menuntut pengakuan bahwa setiap manusia memiliki karakter dan potensi berbeda, sehingga sistem penilaian dan penempatan harus menyesuaikan dengan profil masing-masing. QS At-Taubah: 128 melengkapi keduanya dengan menekankan bahwa kriteria kepemimpinan dalam meritokrasi Islam mencakup empati, kepedulian, dan kasih sayang, bukan semata-mata prestasi material. Dengan demikian, sistem meritokrasi dalam Islam dapat dipahami sebagai pola keberhargaan manusia yang berbasis kompetensi, keadilan, keberagaman fitrah, dan keutamaan moral, yang semuanya diakui, diukur, dan dihargai dalam satu kerangka normatif yang utuh.

KESIMPULAN

Meritokrasi dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai penempatan individu berdasarkan kemampuan dan prestasi, tetapi juga harus disertai integritas, karakter, dan tanggung jawab moral. Hal ini tampak dalam konsep *Al-Qawiyy Al-Amin* yang menegaskan pentingnya kompetensi dan amanah, kemudian pada konsep *Syakilah* yang menunjukkan bahwa manusia bekerja harus sesuai dengan karakter dan kecenderungannya, serta tiga konsep, lafaz *'Azizun 'Alaihi Ma 'Anittum* menunjukkan bahwa pemimpin harus peka terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat atau bawahannya, lafaz *Harisun 'Alaikum* menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki kesungguhan untuk membawa orang yang dipimpinnya menuju kebaikan dan keberhasilan, sementara itu lafaz *Ra'ufun Rahim* menunjukkan bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan kelembutan, kasih sayang, dan kepedulian, bukan dengan sikap keras atau otoriter. Dengan demikian, meritokrasi dalam perspektif Al-Qur'an bersifat holistik karena mengintegrasikan dimensi profesional, moral, dan spiritual. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai tersebut relevan bagi sistem rekrutmen, promosi, dan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja teknis, tetapi juga pada integritas, kecocokan karakter, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, meritokrasi Islam dapat dipahami sebagai paradigma kepemimpinan dan tata kelola yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sekaligus menjadi alternatif terhadap model meritokrasi modern yang cenderung menitikberatkan efisiensi dan capaian material semata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Kencana, 2014.
- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994.
- Abdullah Saeed. *nterpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2006.
- Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, dan Savina Niken M. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 144-52. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.
- Al-Ayyubi, M. Zia. "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed :." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 19, no. 1 (2023): 53-80. <https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1708>.
- Amin, Muhammad Nur. "Kebangsaan dalam Al Quran (Studi Tematik Ayat Ayat Kebangsaan Prespektif Al Mawardi)." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 349-55. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1157>.
- Asy-Syakir, Imam, Ira Nazhifatul Qolbah, dan Solehudin. "Meritokrasi dalam Bingkai Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur'an) (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur'an)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 2, no. 1 (2024): 78-91. <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i1.528>.
- Bisri Mustofa. *Tafsir Al-Ibriz*. Menara Kudus, 1964.
- Budiman, Syarif, Wawan Wahyudin, Ali Muhtarom, dan Akhmad Sufyan. *Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an Abad 2*. 2024.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 28 September 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MERITOKRASI>.
- KEMENAG RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Widya Cahaya, 2011.
- Mangundjaya, Wustari L. "Metode Aassessment Center Sebagai Sarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Identifikasi Potensi dan Kompetensi SDM." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 19423-29. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5959>.
- McNamee, Stephen J. *The Meritocracy Myth*. Rowman & Littlefield Publishers, 2014.
- Meindl, Benjamin, dan Joana Mendonça. "Mapping Industry 4.0 Technologies: From Cyber-Physical Systems to Artificial Intelligence." arXiv:2111.14168. Preprint, arXiv, 28 November 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.14168>.
- Michael Young. *The Rise Of The Meritocracy 1870-2033*. Thames dan Hudson, 1958.
- Minkin, Rachel. "Diversity, Equity and Inclusion in the Workplace: A Survey Report (2023)." Business & Workplace. *Pew Research Center*, 17 Mei 2023. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2023/05/17/diversity-equity-and-inclusion-in-the-workplace/>.
- Muhammad ibnu Jarir. *Terjemah Tafsîr at-Thabari (al-Tabari) Jami' al-Bayan 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*. Pustaka Azzam.
- Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis." *Language Teaching Research* 19, no. 2 (2015): 129-32. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

- Qadafy, Mu'amma Zayn. "Meritokrasi Perspektif Al-Qur'an." *Dialogia* 13, no. 2 (2015): 133-44. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v13i2.288>.
- R Yudhy Pradityo. "Peran Meritokrasi Melalui Manajemen Talenta Pada Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *JURNAL KELITBANGAN* 13 (2025). <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/>.
- Rendi, Rendi Irawan, Eka Prasetiawati, dan Muhammad Nur Amin. "Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Munir Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim." *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 2, no. 1 (2025): 54-68. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v2i1.1083>.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge, 2006.
- Sayid Qutb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2002.
- Siti Khodijah. "Meritokrasi dalam Al-Qur'an (Analisis Etika Rekrutmen Pejabat Publik melalui Perspektif Double Movement Fazlur Rahman)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2025.
- Sulaiman, Kamal, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, dan Dimas Dwi Haryanto. "Sistem Meritokrasi Dalam Upaya Penerapan Good Governance Di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025): 131-40. <https://doi.org/10.9963/1at1c111>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 8. Gema Insani.
- "الباحث القرآني." Diakses 2 April 2026. <https://tafsir.app/>.